



ESG

**RENCANA AKSI
KEUANGAN
BERKELANJUTAN (RAKB)**

TAHUN 2026



Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
1. Ringkasan Eksekutif	<i>1</i>
2. Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	<i>8</i>
3. Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	<i>10</i>
4. Prioritas dan Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	<i>17</i>
5. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	<i>19</i>
Lembar Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	<i>24</i>
Lampiran-lampiran	<i>25</i>

Kata Pengantar

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, BPR menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk Tahun 2026. Tindakan ini mencerminkan dedikasi terhadap prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam aktivitas perbankan sehari-hari, serta mendukung program Perbankan Hijau (*Green Banking*).

Keuangan Berkelanjutan diterapkan sebagai wujud komitmen bersama dalam industri keuangan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan ini sangat penting bagi keberlangsungan BPR, karena mengabaikan aspek sosial dan lingkungan dapat meningkatkan risiko, terutama risiko kredit akibat potensi gagal bayar yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pembiayaan berkelanjutan memberikan efek positif pada stabilitas keuangan BPR NBP 6 dalam jangka panjang.

Di tahun 2025, PT. BPR NBP 6 sedang menyusun RAKB 2026 untuk yang ketiga kalinya. Rencana ini mencakup target penyaluran kredit yang termasuk dalam Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB), khususnya kredit ke Sektor UMKM. Realisasi penyaluran kredit tercatat sebesar Rp. 44.013.915,00 pada tahun 2023, meningkat menjadi Rp. 51.415.450,00 pada tahun 2024, dan mencapai Rp. 57.080.762,00 pada Triwulan III tahun 2025. Sejalan dengan fokus bisnis BPR yang mendukung pengusaha Mikro dan Kecil, BPR NBP 6 berencana untuk terus meningkatkan alokasi pembiayaan ke Sektor UMKM.

BPR NBP 6, dalam menyalurkan pembiayaan ke UMKM, berupaya mencegah dampak buruk terhadap lingkungan. Mereka melakukan analisis kredit yang mempertimbangkan aspek lingkungan dari usaha yang diajukan. Prioritas diberikan dengan menghindari pembiayaan usaha yang berpotensi merusak alam. Kesadaran akan pentingnya keuangan berkelanjutan mendorong BPR NBP 6 untuk menerapkan prinsip triple bottom line (*People, Planet, dan Profit*) serta mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam setiap kegiatan operasionalnya.

Mengingat betapa pentingnya penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi BPR, maka Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) ini menjadi sangat penting sebagai pedoman bagi seluruh staf BPR dalam melaksanakan prinsip Keuangan Berkelanjutan. Laporan RAKB ini merupakan publikasi kedua dari Bank terkait dengan RAKB.

Untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan melalui bisnis yang kuat dan sehat, BPR merancang program-program prioritas dan RAKB Tahun 2026 secara rinci. Implementasi program ini dimulai pada tahun 2026 dan berlangsung selama 1 hingga 5 tahun ke depan (2026-2030), dengan fokus utama pada sektor UMKM. Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Bank, serta mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam kegiatan operasional bisnis guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

BAB I.

Ringkasan Eksekutif

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Tahun 2026 merupakan tahap ketiga implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Dengan demikian disampaikan Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha Berkelanjutan posisi Triwulan III 2025 per 30 September 2025 sesuai pada tabel di bawah ini:

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Uraian	Tahun 2025 (Nominal Rp)	
Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha Berkelanjutan		
a. Penghimpunan Dana (Rp)	Nihil	Nihil
b. Penyaluran Dana (Rp)	1 Produk	47.850.890.000
Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan		
a. Total Kredit / Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	47.850.890.000	
b. Total Kredit/Pembiayaan Non-Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	3.890.838.938	
Persentasi total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan bank (%)	92.48%	
Jumlah dan kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan	Nominal Rp	NPL (%)
a. Energi Terbarukan	0	0
b. Efisiensi Energi	0	0
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	0	0
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	0	0
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	0	0
f. Transportasi Ramah Lingkungan	0	0
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	0	0
h. Adaptasi Perubahan Iklim	0	0
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Eco-Efficient)	0	0
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional atau Internasional	0	0
k. Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	0	0
i. Kegiatan UMKM	47.850.890.000	6.69%



Tabel Pencapaian Produk Keuangan Berkelanjutan

Nama Komponen	Posisi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025 (Triwulan 3)	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
a. Jumlah Produk Penghimpunan Dana Berkelanjutan	-	-	-	-
a.1. DPK	-	-	-	-
a.2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
b. Outstanding Penghimpunan Dana Berkelanjutan (Rp)	-	-	-	-
b.1. DPK (Rp)	-	-	-	-
b.2. Surat Berharga (Rp)	-	-	-	-
c. Jumlah Penyaluran Dana Berkelanjutan	-	-	-	-
c.1. Kredit	-	-	-	-
c.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
d. Outstanding Penyaluran Dana Berkelanjutan (Rp)	-	-	-	-
d.1. Kredit (Rp)	-	-	-	-



RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2026

PT BPR NBP 6

Website: www.bprnbp6.com, Email: bpr_nbp06@yahoo.com

d.2. Surat Berharga yang dimiliki (Rp)	-	-	-	-
Total Kredit/Pembiayaan Bank Kepada Pihak Ketiga (Rp)	-	-	-	-
Persentase total kredit/ pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan bank (%)	-	-	-	-

Tabel Outstanding Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Nama Komponen	Baki Debet Posisi Tahun 2024	Baki Debet Tahun 2025 (Triwulan 3)	Target Baki Debet Tahun 2025	Target Baki Debet Tahun 2026
Total outstanding kredit/ pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	-	-	-	-
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	-	-	-	-

Tabel NPL Gross Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Nama Komponen	NPL Posisi Tahun 2024	NPL Tahun 2025 (Triwulan 3)	Target NPL Tahun 2025	Target NPL Tahun 2026
---------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------



NPL Gross kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (%)	-	-	-	-
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	-	-	-	-

1.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Visi:

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

Misi:

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup.



1.3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Mengacu pada POJK No. 51/ POJK.03/2017 tertanggal 27 Juli 2017 perihal Keuangan Berkelanjutan, BPR sebagai Lembaga Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan konsep keuangan berkelanjutan secara bertahap. Hal ini mencakup pengintegrasian delapan prinsip utama ke dalam kerangka organisasi, dengan fokus pada keseimbangan antara tiga aspek fundamental: Keuntungan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, dan Kelestarian Lingkungan.
2. Dalam implementasinya, BPR diwajibkan menyusun RAKB yang merupakan dokumen komprehensif menggambarkan rencana kegiatan usaha baik jangka pendek maupun panjang. Dokumen ini mencakup strategi konkret untuk merealisasikan program kerja dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang tepat.
3. Sesuai ketentuan, BPR harus menyusun Laporan Keberlanjutan yang secara menyeluruh mengungkapkan kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan dalam konteks praktik bisnis berkelanjutan.
4. Prosedur ini mengatur secara rinci mekanisme koordinasi antarunit dalam organisasi BPR, meliputi peran strategis Direksi, Bagian Bisnis, Sumber Daya Manusia, Unit Kepatuhan, dan Manajemen Risiko.
5. Untuk mendukung transformasi digital dan implementasi keuangan berkelanjutan, BPR membutuhkan Standar Pedoman Operasional yang komprehensif dan adaptif.

Target Net Zero Emission untuk Operasional	NaN
Target Net Zero Emission untuk	NaN

Pembiayaan

Program Kerja dan Road Map Aksi Keuangan Berkelanjutan
1.4.1. Program Rencana Tahun Depan (Jangka Pendek)

No	Kategori, Jenis, dan Periode Pelaksanaan	Uraian Aktivitas	Target dan Tujuan	Indikator Pencapaian
1	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank) 01 Nov 2025 s/d 30 Nov 2025	Mengurangi penggunaan kertas	Penghematan pemakaian kertas dan mendukung program GO Green.	Penghematan pemakaian kertas sebesar 5% dibandingkan tahun 2024
2	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank) 01 Feb 2026 s/d 28 Feb 2026	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup (Reminder)	Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.
3	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank) 01 Jul 2026 s/d 31 Jul 2026	Mengurangi Penggunaan Kertas	Penghematan dan mendukung program go green	Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2025 dan Peningkatan Utilitas e-office/ email.
4	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank) 01 Agt 2026 s/d 31 Agt 2026	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan	Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.	Penurunan penggunaan air minum kemasan dan Penggunaan Tumbler/gelas di setiap Rapat dan Pelatihan.

1.4.2. Road Map dan Program Rencana Lima Tahun (Jangka Panjang)

No	Tahun	Kategori, Jenis, dan Uraian Kegiatan	Target Kegiatan dan Indikator Keberhasilan
1	2026	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank): Mengadakan Sosialisasi, Training (inhouse/public course) atau workshop terkait Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) kepada Internal Pegawai	Meningkatkan kompetensi pegawai tentang Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai dan / atau target training yang telah ditetapkan.
2	2026	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank):	Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan

		Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup (Reminder)	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.
3	2026	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank): Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan	Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai. Penurunan penggunaan air minum kemasan dan Penggunaan Tumblr/ gelas di setiap Rapat dan Pelatihan.

Alokasi Sumber Daya, Penanggung Jawab, serta Mitra Kerja Sama

1.5. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan

BPR akan mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Alokasi Sumber Dana

Rp0

1.6. Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan serta Mitra Kerja Sama

1. Unit Kerja RAKB menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan satuan kerja terkait khususnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan.
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko memastikan penyusunan pedoman perusahaan dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank, melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait aspek Kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank. Selanjutnya melakukan monitoring Risiko Bank (Kredit dan Risiko Lainnya) terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
3. Satuan Kerja Personalia, Pendidikan dan Sekretariat melakukan pengembangan kapasitas intern pegawai terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan.
4. Seluruh karyawan menjadi penanggungjawab pelaksanaan program keuangan berkelanjutan.

BAB II.

Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan

Berikut adalah rujukan yang menjadi dasar bagi BPR dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan:

- a. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Indonesia periode 2015 – 2019.
- b. Inisiatif Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II di Indonesia periode 2021 hingga 2025.
- c. Pada tanggal 27 Juli 2017, OJK menerbitkan Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai implementasi Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.



2.2. Keterlibatan Pihak Penyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), BPR memutuskan untuk

melakukannya secara internal, tanpa bantuan konsultan atau pihak eksternal. Proses ini ditangani oleh Bagian Penyusunan RKA Divisi Perencanaan, dengan kontribusi dari unit kerja yang relevan dengan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan. Unit kerja yang berpartisipasi meliputi:

- Bagian Kredit serta Bagian Dana dan Jasa berkolaborasi dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan berkelanjutan.
- PE SDM dan Umum berkolaborasi dalam peningkatan kapasitas internal.
- PE SDM & Umum, PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, Tata Kelola, serta Standar Operasional Prosedur.



Keterlibatan Direksi	2 Orang
Keterlibatan Pejabat	8 Orang
Keterlibatan Konsultan	0 Orang
Keterlibatan Pihak Eksternal Lain	0 Orang

BAB III.

Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

3.1. Rencana Strategis Bank

Menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat ini BPR akan terus mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Surabaya pada umumnya selain dari kredit utama BPR yang pasarannya adalah pegawai negeri sipil daerah dan kontraktor, maka BPR juga akan membantu kredit UMKM sesuai dengan arah dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk menunjang hal tersebut BPR akan melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada para pegawai agar bisa menyesuaikan dengan arah kebijakan ekonomi dan dapat meminimalisir risiko yang akan tumbuh dikemudian hari.

Menyesuaikan dengan kebutuhan pasar maka Bank akan fokus pada peningkatan laba dan selalu memperhatikan RAKB sesuai dengan arahan OJK dengan cara :

1. Penyesuaian prosedur penyaluran kredit.
2. Membangun Desk Layanan Pelanggan dan Call Centre untuk merespon kebutuhan nasabah.



Sesuai dengan visi BPR untuk menjadi Bank berdaya saing tinggi dan kuat di Surabaya BPR mempunyai strategi sebagai berikut :

1. BPR akan melakukan ekspansi bisnis ke kabupaten-kabupaten di Jawa Timur.
2. Ikut serta dalam pemberian kredit sindikasi bersama mitra Bank daerah.
3. Memberikan fasilitas layanan prioritas kepada nasabah.
4. Pembuatan promosi audio maupun video.



3.2. Kapasitas Organisasi

A. Struktur Organisasi dan Jajaran Eksekutif

Dewan Komsaris Bank		
No	Nama	Jabatan
1	Hengky Parsungkunan Sitorus	Komisaris Utama
2	Rasmahita Sitanggang	Komisaris

Direksi Bank		
No	Nama	Jabatan
1	Lisna Kristina Raya Saragi	Direktur Utama
2	Parlagutan	Direktur

Pejabat Eksekutif/Divisi / Unit /Satuan Kerja		
No	Nama	Jabatan
1	Hepta Marnala Sirait	Kepala Bagian Operasional
2	Rina Seftina Pakpahan	PE Kepatuhan & Manajemen Resiko
3	Berman Martua Siboro	PE Audit Intern
4	Ramayanti Sinaga	PE SDM & Umum
5	Darianto TM Berutu	Kepala Bagian Lending
6	Mawardi Budiono	Kepala Bagian Funding
7	Maslan Anyta Sihombing	Kepala Bagian Penagihan
8	Ester Novalina Simanjuntak	Kepala Cabang

B. Total Susunan Kepegawaian

Dalam menghadapi persaingan yang kian ketat, BPR memerlukan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya masing-masing, serta memberikan perhatian pada prinsip kesetaraan gender dalam proses rekrutmen karyawan.

Jumlah Komposisi Pegawai Bank Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Doktoral (S3)	0
2	Pasca Sarjana (S2)	0
3	Sarjana (S1)	25
4	Sarjana Muda / Diploma	17
5	SMA Atau Sederajat	10
6	SMP Sederajat	1
7	SD Sederajat	0
Total		53

Jumlah Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender		
No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	32
2	Perempuan	21
Total		53

C. Peningkatan Kualitas SDM

Untuk mengembangkan sumber daya manusia, BPR mengadakan berbagai pelatihan bagi pegawainya, baik secara tatap muka maupun daring, sehingga BPR dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

Berikut adalah kondisi keuangan Bank yang terte

A.Kinerja Keuangan

No	Indikator	2025 (TW III)	2024	2023
1	Total Aset	95,561	82,862	67,609
2	Modal Inti	8,410	8,492	8,459
3	Kredit Yang Diberikan	69,833	61,120	52,859
4	Dana Pihak Ketiga	71,528	60,092	51,134
5	Pendapatan Operasional	15,340	17,039	15,331
6	Beban Operasional	13,006	14,525	12,955
7	Lab a Operasional	2,334	2,514	2,375

ra pada tabel: masih perlu perbaikan tabel, 2025

B. Rasio Keuangan

No	Rasio	2025 (TW III)	2024	2023
1	Rasio KPMM	13.67	16.88	20.55
2	NPL Gross	4.59	3.80	2.96
3	NPL Net	0.89	0.69	1.05
4	ROA	3.67	3.17	4.04
5	NIM	18.78	15.63	21.64
6	Rasio BOPO	84.79	85.25	84.51
7	LDR	97.63	101.71	88.70

Penetapan tujuan dan prioritas Keuangan Berkelanjutan didukung oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini mencakup aspek internal dan eksternal yang sudah ada atau sedang berlangsung di

dalam maupun di luar lingkungan BPR. BPR menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan mereka. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Dokumen rencana strategis bisnis yang sudah ada.
2. Tingkat kemampuan organisasi yang ada saat ini;
3. Keadaan finansial dan kemampuan teknis terkini yang dipunyai;
4. Jalinan kolaborasi dengan pihak luar, bila relevan;
5. Strategi komunikasi yang berlaku saat ini;
6. Pelaksanaan sistem pemantauan, evaluasi, serta mitigasi yang telah berjalan selama ini; dan
7. Peraturan pemerintah yang membahas tentang topik Keuangan Berkelanjutan.



Strategi, Sistem, dan Faktor Lainnya

3.4. Strategi Komunikasi

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, BPR berupaya membangun komunikasi yang efektif. Upaya ini dianggap krusial karena berkontribusi pada peningkatan kinerja karyawan dan keberlanjutan perusahaan. Sehubungan dengan Keuangan Berkelanjutan, BPR secara terus-menerus menekankan pentingnya operasional yang berfokus pada perlindungan lingkungan, yang direalisasikan melalui berbagai program dan inisiatif, seperti:

1. Menerapkan praktik hemat dalam konsumsi energi, air, dan penggunaan kertas.
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pekerja tentang pentingnya pola hidup ramah lingkungan.



3.5. Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

Untuk menjamin implementasi rencana dan keberlanjutan evaluasi demi hasil optimal, monitoring dilakukan berkala. Mekanisme monitoring mencakup:

1. Pertemuan Dewan Komisaris dan Direksi diadakan untuk memantau perkembangan kondisi terkini.
2. Pertemuan rutin diadakan untuk mengawasi performa setiap unit kerja.





3.6. Kebijakan Pemerintah, dan Faktor Lainnya

Pemerintah telah menetapkan peraturan dan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan RAKB.

BAB IV.

Prioritas dan Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

4.1. Penyesuaian struktur organisasi, pengelolaan risiko, tata kelola, serta standar prosedur operasional yang mendukung keberlanjutan keuangan.

a. Dasar Pemikiran

Penguatan serta pengembangan struktur organisasi perusahaan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan dan implementasinya, karena organisasi merupakan fondasi utama bagi terciptanya keuangan yang berkelanjutan. Implementasi keuangan berkelanjutan dimulai dari setiap level organisasi. Komitmen dan dukungan manajemen menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program-program yang telah direncanakan. Setiap unit organisasi harus bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya, selaras dengan visi, misi, tujuan bisnis, dan strategi perusahaan, serta memberikan masukan kepada Direksi untuk menentukan langkah lanjutan dalam penyelesaian kasus pelanggaran atau kejahatan yang terjadi.

b. Rencana Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Periode	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan	01 Agt 2026 s/d 31 Agt 2026	SDM	Bagian Kepatuhan
2	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup (Reminder)	01 Feb 2026 s/d 28 Feb 2026	SDM	Kepatuhan

c. Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan pembiayaan yang bersumber dari perusahaan. Tugas pelaksanaannya akan diemban oleh Divisi Penanggung Jawab, melibatkan semua elemen dalam struktur organisasi, serta memerlukan masukan dari regulator, auditor eksternal, maupun konsultan/praktisi terkait.

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Penilaian akan dilakukan dengan mengacu pada parameter dan jadwal yang telah disusun secara menyeluruh oleh unit organisasi yang bertanggung jawab.

e. Tantangan dan Rencana Kedepan



Beberapa tantangan eksternal meliputi perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi permintaan agregat masyarakat terhadap program keuangan berkelanjutan, serta faktor-faktor lainnya.

BAB V.

Tindak Lanjut dan Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Pegawai, Pejabat dan/atau Unit Kerja yang Bertanggung Jawab terhadap Monitoring dan Evaluasi

1. Pemantauan merupakan aktivitas penting untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan dilaksanakan secara efektif.
2. Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dilakukan di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan dievaluasi pada akhir setiap periode kegiatan.
3. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas dan pencapaian program, serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peran Direktur Kepatuhan dan kepala divisi terkait dalam hal ini sangat penting.
4. Fungsi Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, sedangkan Manajemen Risiko melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kerangka penerapan manajemen risiko.
5. Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dilakukan di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan dievaluasi pada akhir setiap periode kegiatan.
6. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas dan pencapaian program, serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
7. Direktur Kepatuhan dan Kepala Divisi terkait memantau pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan dari sisi kepatuhan dan aspek hukum, sedangkan Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kerangka penerapan manajemen risiko.

5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Guna menjamin efektivitas implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, perlu ditetapkan periodisasi yang teratur. Hal ini mempertimbangkan koordinasi antar pemangku kepentingan, standar yang diterapkan, dan kesepahaman dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, waktu pengukuran dan pelaporan realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan mencakup:

1. Pengawasan Implementasi Rencana Aksi Kekurangan berkelanjutan periode saat ini
2. Sustainable Finance Action Plan

No	Aktivitas	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun berjalan	Bulan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RAK dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait
2	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Akhir November Tahun Berjalan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RKA dan RAKB
3	Laporan Keberlanjutan	Paling lambat akhir April Tahun berjalan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RKA dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait

5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Apabila implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak berjalan sesuai ekspektasi dan linimasa yang telah ditetapkan, bank akan mengambil langkah- langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Aksi keuangan berkelanjutan diimplementasikan dan disosialisasikan sepanjang tahun ini.
2. Evaluasi kembali indikator-indikator kinerja yang diterapkan untuk periode mendatang.
3. Memperbaiki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan fokus pada perbaikan kekurangan yang ada dalam proses penyusunan sebelumnya.

5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Mencapai Tujuan yang Diinginkan

Guna mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul akibat implementasi keuangan berkelanjutan, BPR wajib melaksanakan pemetaan risiko pada setiap rencana prioritas. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif.

A. Pengenalan Keuangan Berkelanjutan

Untuk mengurangi risiko terkait perubahan organisasi, pengelolaan risiko, tata kelola, dan/atau standar Prosedur Operasional yang mendukung keuangan berkelanjutan, penting untuk menyosialisasikan urgensi keuangan berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini juga mencakup penekanan pada pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan demi kehidupan saat ini dan masa depan, agar bisnis perbankan dapat terus eksis dan tumbuh di waktu mendatang.

B. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Keuangan Berkelanjutan.

- a. Peningkatan kompetensi staf diperlukan agar mereka lebih mengerti fitur dan manfaat produk dan/atau jasa yang ditawarkan. Inisiatif ini ditujukan bagi staf di unit-unit seperti manajemen risiko, business development, dan customer service.
- b.

Sebelum implementasi, rancang dan laksanakan program peningkatan kapasitas internal. Prioritaskan pengurus bank dan staf yang bertanggung jawab atas implementasi Keuangan Berkelanjutan. Selanjutnya, program peningkatan kapasitas internal jangka panjang harus mencakup semua pegawai, karena keberhasilan Keuangan Berkelanjutan bergantung pada dukungan seluruh staf.

- c. Mempersiapkan SDM yang ada agar mampu melaksanakan program-program Keuangan Berkelanjutan. Persiapan ini bisa dilakukan melalui perubahan kriteria rekrutmen, penyelenggaraan pelatihan, proses pengembangan kompetensi, modifikasi sistem penilaian kinerja, serta penyesuaian sistem remunerasi.

C. Inovasi dan adaptasi produk pendanaan, jasa, serta layanan perbankan untuk memfasilitasi keuangan berkelanjutan.

- a. Fokus pada pengamatan dan pemeliharaan pasar yang diyakini dapat memberikan pengaruh baik bagi kemajuan serta penguatan sektor UMKM binaan, pariwisata, dan potensi daerah lainnya. Dengan memperhatikan kondisi ini, BPR berencana mengembangkan layanan inovatif untuk mempermudah transaksi nasabah, contohnya melalui layanan mobil Kas Keliling yang dirancang khusus agar dapat melayani kebutuhan perbankan nasabah di berbagai lokasi dan waktu.
- b. Bank wajib mengevaluasi keamanan produk dan jasa bagi nasabah, serta menyajikan jumlah dan persentasenya. Hal ini menjamin bahwa produk dan jasa yang ditawarkan telah melalui pengujian keamanan yang memadai, termasuk mitigasi risiko dan pemilihan rekanan bisnis yang tepat.
- c. BPR melindungi dan menjamin keamanan produk bagi nasabah melalui penyediaan fitur layanan yang aman dan nyaman. Pengembangan fitur layanan terus dilakukan dengan dukungan teknologi informasi, berfokus pada ketersediaan sistem (system availability), keandalan sistem (system reliability), dan keamanan siber (cyber security). Sistem deteksi penipuan (fraud detection system) juga diawasi dengan ketat. Seluruh produk diupayakan telah melalui pengujian keamanan untuk meminimalkan potensi kerugian. BPR secara proaktif memberikan informasi mengenai semua risiko yang mungkin timbul kepada nasabah, sebagai bahan pertimbangan sebelum menggunakan produk yang ditawarkan.
- d. Melalui survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, BPR dapat mengidentifikasi efek positif dan negatifnya. Survei ini menjadi alat komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Temuan survei, beserta langkah mitigasi dampak negatif, dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan transparansi dan penyampaian informasi yang seimbang, tidak hanya berfokus pada dampak positif.
- e. BPR akan selalu berupaya memelihara relasi yang positif dengan nasabah, mengingat mereka adalah pemangku kepentingan yang krusial. Hal ini dilakukan agar BPR dapat menerima umpan balik yang berguna untuk menilai performa bank. Selain nasabah, bank juga perlu mempertimbangkan masukan dari pihak- pihak berkepentingan lainnya, termasuk karyawan, komunitas lokal, dan Regulator.

D. Pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

- a. Fokus pada penjagaan serta pengembangan portofolio pembiayaan yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan aspek sosial.
- b. Memperkuat kemampuan bank dalam mengidentifikasi risiko lingkungan dan manfaat positif dari penyaluran kredit.
- c. Mempererat kerja sama dan sinkronisasi antara perbankan dan sektor industri yang ramah lingkungan.
- d. Bank perlu menetapkan batasan minimal penyaluran kredit internal. Meskipun aturan telah ada, kewajiban terkait jumlah minimal kredit yang harus disalurkan belum ditetapkan. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi beban ekosistem terhadap usaha yang didanai bank yang masih besar, serta kurangnya tekanan publik terkait implementasi kelestarian lingkungan.
- e. Debitur dengan kolektibilitas rendah yang telah menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan secara efektif dalam bisnisnya akan diberikan insentif. Prioritas diberikan pada efisiensi sumber daya alam, pencegahan kerusakan lingkungan, pengurangan polusi dan limbah, perbaikan ekosistem, serta penanganan ketidakadilan sosial atau solusi bagi masyarakat yang terdampak perubahan iklim.

E. Fasilitas dan Infrastruktur

Bank berupaya memanfaatkan sarana dan prasarana yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya. Upaya mitigasi risiko dilakukan melalui pencegahan atau pembatasan kerusakan lingkungan, pengurangan polusi dan limbah, perbaikan ekosistem, serta mengatasi ketidakadilan sosial. Hal ini mencakup pengelolaan polusi dan limbah, menghindari konflik sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi lingkungan, menerapkan proses produksi rendah karbon, dan memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak perubahan iklim. Implementasinya melibatkan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya, daur ulang, peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak, dan lain-lain.

F. Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang selaras dengan inisiatif keuangan berkelanjutan.

- a. Untuk memastikan keberlanjutan komitmen dalam pelaksanaan aktifitas CSR, risiko yang muncul dari kegiatan tersebut perlu dipantau dan dievaluasi oleh seorang Direksi.
- b. Upaya mitigasi risiko dalam bidang CSR melibatkan perancangan aktivitas CSR yang berhubungan dengan potensi risiko. Selanjutnya, analisis risiko dilakukan dengan melibatkan berbagai divisi yang mungkin terdampak.
- c. Kegiatan CSR harus menjadi tanggung jawab semua divisi dan terintegrasi sejak awal kegiatan bisnis, bukan hanya dilakukan di akhir tahun setelah perusahaan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR harus direncanakan dengan matang dan memiliki strategi pencapaian yang efektif.



5.5. Penutup

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini dibuat sebagai panduan dan referensi bagi Direksi dalam menjalankan implementasi Keuangan Berkelanjutan.



PT BPR NBP 6
JLN SM RAJA NO 81 KEL. PEMATANG TANAH JAWA, KEC. TANAH JAWA, KAB.
SIMALUNGUN

Telepon: (0622) 7562048

Website: www.bprnbp6.com, Email: bpr_nbp06@yahoo.com

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN RAKB (RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN)

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan RAKB Tahun 2026
PT BPR NBP 6**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Demikian Laporan RAKB Tahun 2026 ini disusun sebagai wujud komitmen Bank dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan kinerja perbankan yang baik yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan 3P yaitu Profit (Ekonomi), People (Sosial) dan Planet (Lingkungan).

Tanah Jawa, 29 Desember 2025

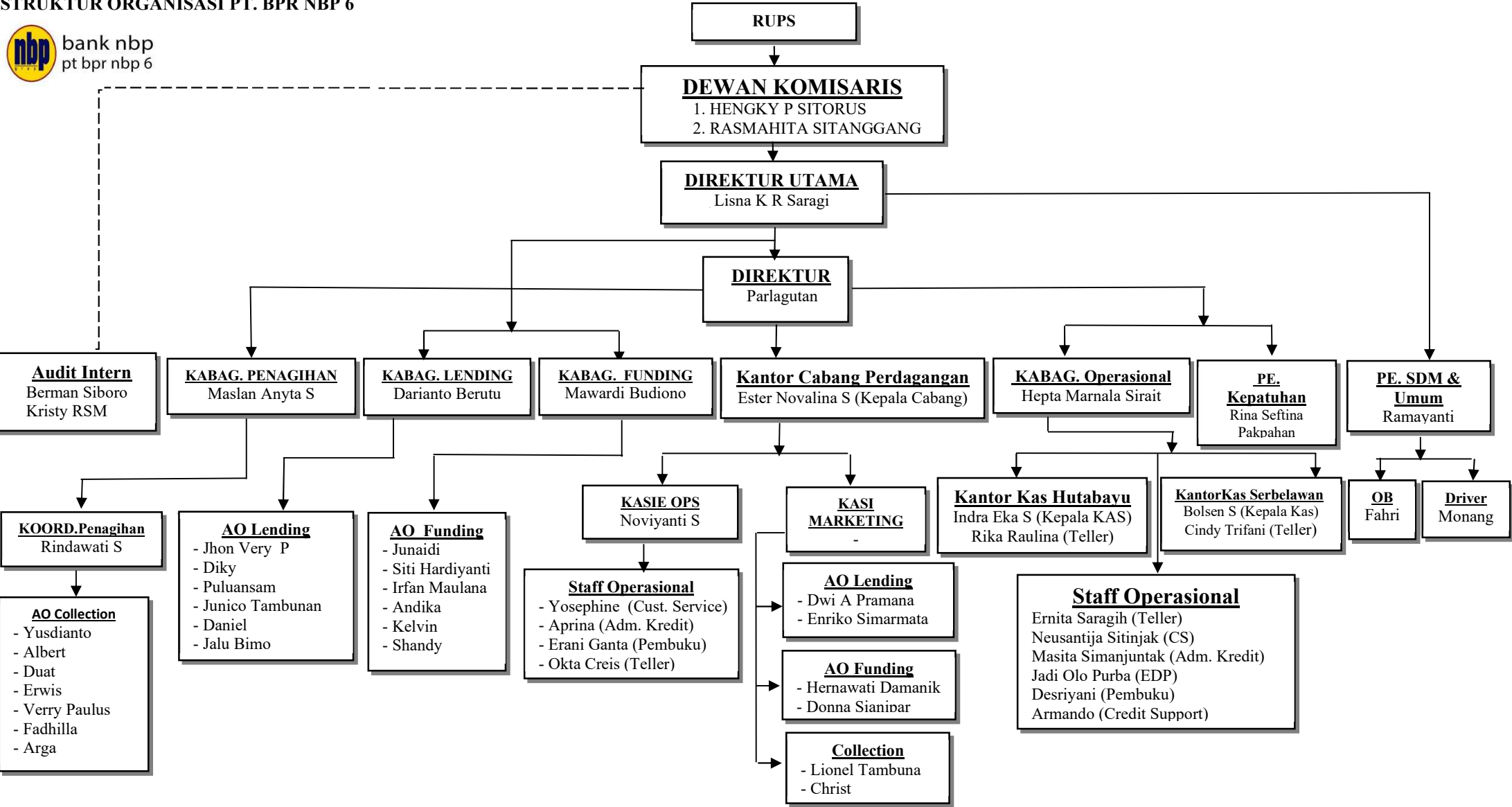
PT BPR NBP 6

Hengky Parsungkunan
Komisaris Utama



bank nbp
pt bpr nbp 6

Lisna Krsitina Raya Saragi
Direktur Utama





PT BPR NBP 6

**JLN SM RAJA NO 81 KEL. PEMATANG TANAH JAWA, KEC. TANAH JAWA, KAB.
SIMALUNGUN**

Telepon: (0622) 7562048

Website: www.bprnbp6.com, Email: bpr_nbp06@yahoo.com

Nomor : 1225/PT BPR NBP 6/XII/2025
Tanggal : 29 Desember 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada

Nina Yesika Sembiring

Medan

Jl. Gatot Subroto No. 180 Medan

Sumatera Utara 20123

Referensi:

1. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Perihal : **Penyampaian Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT BPR
NBP 6 Tahun 2026**

Mengacu pada referensi tersebut di atas Lembaga Jasa Keuangan dalam hal ini BPR dan BPRS wajib menyusun dan menyampaikan Laporan RAKB ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahunnya pada waktu yang sama dengan penyampaian RBB (Rencana Bisnis Bank) yaitu paling lambat tanggal 15 Desember. Oleh karenanya menunjuk perihal dimaksud, kami menyampaikan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT BPR NBP 6 Tahun 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tanah Jawa, 29 Desember 2025

PT BPR NBP 6



bank nbp
pt bpr nbp 6

Lisna Kristina Raya Saragi
Direktur Utama